

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Film tidak hanya sebagai media massa hiburan, informasi, alat pendidikan, tetapi juga merupakan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa yang tidak bebas dari nilai. Kemampuan mengolah pesan yang unik menjadikan film sebagai alat yang mudah menarik perhatian masyarakat dalam merefleksikan ruang sosial yang kian berubah. Menurut McQuail (2011: 14) pesan yang terkandung dalam film lahir dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat dan juga bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. Lebih jauh, Haskel (dalam Sutanto, 2017: 5) mengungkapkan bahwa film adalah media yang kaya dalam penggalian stereotip, hal ini terjadi karena stereotip ada di dalam masyarakat.

Salah satu persoalan stereotipe yang dibesarkan oleh media adalah penggambaran peran perempuan dan laki-laki yang keliru. Alih-alih menyajikan tayangan yang seimbang, media massa lebih jauh mereproduksi tatanan sosial yang abai terhadap peran serta hak-hak perempuan dan laki-laki. Menurut Nelmes (dalam Sutanto, 2017: 5), film dapat digunakan sebagai alat mengubah stereotip perempuan di masyarakat. Salah satu film yang memiliki spirit pemberdayaan perempuan yaitu *Kim Ji-Young: Born 1982*. Unsur feminisme kekuasaan terdapat dalam film *Kim Ji-Young: Born 1982*. Naomi Wolf dalam bukunya *Fire with Fire* mendorong perempuan untuk menunjukkan kekuatannya alih-alih mengidentifikasi kerentanan dan kelemahan yang membuat perempuan berpotensi mengalami penindasan dan diskriminasi. Feminisme kekuasaan menganggap tidak ada salah

satu gender lebih baik dari yang lainnya tetapi berupaya menciptakan kesetaraan karena perempuan pada dasarnya berhak atas hal tersebut (Wolf, 1994: 53).

Kim Ji-Young: Born 1982 merupakan satu dari segelintir film tentang perempuan yang juga disutradarai oleh sosok perempuan. Industri film yang didominasi oleh peran dan sosok laki-laki, terlebih lagi tidak banyak film yang berani menampilkan kondisi perempuan Korea Selatan yang sebenarnya menjadikan film *Kim Ji-Young Born 1982* sebagai film yang *anti mainstream*. *Kim Ji-Young: Born 1982* adalah sajian yang lengkap, ada isu peran ganda perempuan modern, pelecehan seksual, diskriminasi, marginalitas bahkan *internalized misogyny*.

Bukan hanya isu yang kompleks, ada pula jurang terjal yang harus dihadapi *Kim Ji-Young: Born 1982*. Dari novelnya hingga film ini dirilis, *Kim Ji-Young: Born 1982* kerap menuai kontra dari masyarakat Korea Selatan. Mulai dari pemain film dan tokoh publik yang mendukung film ini dikecam oleh kelompok yang berseberangan sampai munculnya petisi film ini dilarang untuk ditayangkan. Kendati demikian, *Kim Ji-Young: Born 1982* tak lantas sepi penonton. Sejak minggu pertama penayangannya, film ini telah memuncaki *box office* Korea mengalahkan film-film Hollywood besar. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya perempuan-perempuan yang mendukung film ini diam-diam membeli tiket film berkali-kali agar penjualan tiket meningkat (Cnbcindonesia.com, 2019).

Dalam diskursus feminisme, ada kecenderungan keluarga dilihat sebagai salah satu sentrum proses domestifikasi perempuan dan merupakan salah satu

tatanan sosial yang semestinya diubah (Djoharwinarli, 2012: 67). Film asal Korea Selatan ini mengisahkan tentang Kim Ji-Young yang hidup di dalam kultur keluarga patriarki. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah menikah dan memiliki anak, namun dalam menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu dan istri, Kim Ji-Young mengalami dilema dan ingin kembali berkarir. Sosok Kim Ji-Young banyak mengalami diskriminasi dari lingkungannya yang patriarki. Sejak kecil ia disubordinasi oleh ayahnya hanya karena dia terlahir sebagai seorang perempuan. Saat remaja ia mendapat pelecehan di tempat umum, dan sebagai seorang menantu, dia hidup dalam tekanan mertuanya yang menganut nilai tradisional patriarki, ibu mertuanya mempercayai bahwa peran perempuan dalam kehidupan berumah tangga adalah mengabdikan, melayani, dan memasrahkan segenap jiwa raganya untuk keluarga dan suaminya (Geotimes.co.id, 2020).

Masyarakat di seluruh dunia didominasi oleh lingkungan hidup patriarki, di mana dalam lingkungan ini laki-laki memegang kendali utama di tengah masyarakat sementara itu perempuan cenderung terpinggirkan, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Di tengah-tengah kentalnya budaya patriarki di Korea Selatan, *Kim Ji-Young: Born 1982* hadir sebagai bentuk kritik terhadap lingkungan sosial yang tidak adil bagi perempuan sehingga dianggap sebagai ancaman bagi kelompok yang menentang gerakan pemberdayaan perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang sutradara Kim Do-Young kepada Forbes bahwa ia sangat ingin menyampaikan pesan di dalam film ini karena *Kim Ji-Young: Born 1982*

adalah refleksi dari kondisi yang dialami oleh perempuan-perempuan di sekitarnya (Forbes, 2020).

Korea Selatan merupakan negara di Asia dengan pertumbuhan industri yang amat pesat. Kendati demikian, dibalik perkembangan pesat negaranya, masyarakat Korea Selatan masih memegang erat nilai-nilai kebudayaan leluhurnya. Salah satu praktik kebudayaan yang saat ini masih terjadi di Korea Selatan adalah lingkungan budaya patriaki dan menempatkan perempuan sebagai kaum kelas kedua (B. J. Park dalam Febriyanti, 2022: 117). Saat berumah tangga, perempuan Korea Selatan dituntut untuk mampu memperhatikan suami dan sanak saudara suami. Banyaknya ekspektasi yang dibebankan kepada perempuan sebagai seorang anak, istri, ibu, dan menantu membuatnya mengalami kesulitan. Sebagaimana terjadi di lingkungan keluarga Ji-Young, menurut mertuanya, yang perlu dilakukan Ji-Young hanyalah melayani suami sehingga saat Ji-Young memiliki keinginan untuk berkarir, ia takut akan respon yang akan diberikan oleh ibu mertuanya.

Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Relasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan topik yang baru. Perbedaan gender yang semestinya tidak menjadi suatu masalah selama tidak menghasilkan kesenjangan ini justru melahirkan berbagai ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. *Global Gender Gap* tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 101 secara global dengan indeks kesenjangan sekitar 68,8% yang mana lebih besar 1,3% dari tahun 2020. Hasil ini diurutkan dengan mengukur keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam tingkat kesehatan,

pendidikan, lapangan kerja, dan politik (Weforum.org, 2021). Kurangnya partisipasi perempuan-perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara Indonesia.

Satu-satunya suku di Indonesia yang terkenal dengan pemuliaan kaum perempuan melalui sistem matrilinealnya adalah suku Minangkabau. Verayanti, DKK (2003: 2) menyampaikan bahwa dalam sistem matrilineal, perempuan diposisikan dengan karakteristik yang khas yaitu, keturunan diatur menurut garis keturunan Ibu, sumber ekonomi pemanfaatannya untuk kaum ibu, pemilik dan pewaris sah pusako adalah ibu dan suara kaum ibu didengar untuk kepentingan kaum keluarga mencapai keputusan.

Dalam bukunya berjudul Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal, Verayanti, DKK melakukan penelitian di tiga nagari di tiga kabupaten di Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Minangkabau merupakan suku yang matrilineal namun sistem kekuasaannya bukanlah matriarkat. Kekuasaan formal baik secara tradisional dan modern tetap berada ditangan kelompok laki-laki (Fatmariza dalam Verayanti, 2003: 5).

Salah satu penelitian Women Research Institute di Solok, Sumatera Barat, menyebutkan bahwa meskipun perempuan mewarisi tanah pusaka, pada kenyataannya terdapat banyak kasus Mamak (saudara laki-laki Ibu) menjual tanah warisan tanpa persetujuan saudari-saudarinya. Dalam suku Minang, mamak atau

paman merupakan pemimpin dalam wilayah rumah tangga saparuik (satu perut, satu ibu) (Rappler.com, 2015). Menurut Stockard dan Johnson (dalam Verayanti, 2003: 4) aspek penting yang dapat memperkuat status perempuan adalah kepemilikan perempuan atas sumber-sumber ekonomi. Melakukan upaya peminggiran perempuan dalam sumber ekonomi adalah melakukan upaya peminggiran dari sumber-sumber kekuasaan.

Saat ini peran institusi Bundo Kanduang hanya dijadikan hiasan upacara adat dan negara. Berkurangnya peran Bundo Kanduang tercermin pada minimnya partisipasi perempuan Minang pada anggota legislatif. Pada tahun 2009-2014, hanya 12% perempuan yang berpartisipasi pada bangku politik. Hal ini juga tidak berubah pada tahun 2014-2019, jumlah anggota DPRD Sumatera Barat berjumlah 65 orang, hanya 7 orang perempuan yang berpartisipasi artinya hanya 12% dari jumlah tersebut (Helmi, Chandra dan Hendriko Arial, 2022: 22). Kenyataannya, bangku politik Sumatra Barat tidak pernah memenuhi 30% keterwakilan perempuan di dalam DPRD Sumatra Barat.

Sri Setyawati sebagai perwakilan Pasca Sarjana Universitas Andalas membawa topik akar kekerasan di lingkungan Minangkabau dalam forum ilmiah Gender Studies Forum di Fakultas Hukum Univ. Indonesia Agustus lalu. Ia menyampaikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi diinstitusi agama di tengah-tengah budaya adat Minangkabau yang memegang kuat agama dan adat. Akar permasalahan ini muncul dari relasi kuasa yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Sri mencoba bekerja sama dengan Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Publikasi

di perkampungan Nagari Sijunjung untuk mengumpulkan perempuan Minang yang dikeluarkan dari kotak lembaga Bundo Kandung guna mengatasi permasalahan di atas (Jurnalperempuan.org, 2022). Institusi yang paling berkemungkinan besar mengalami kekerasan akibat relasi kuasa adalah keluarga. Organisasi Women's Crisis Center/ WCC Nurani Perempuan melaporkan telah terjadi peningkatan kasus KDRT sepanjang tahun 2020 di Padang hingga mencapai angka 104 kasus (Fachruddin, 2020).

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, khalayak Kim Ji-Young menyampaikan bahwa perempuan Minangkabau mengalami kesenjangan di wilayah domestik dan publik. Menurut ID, perempuan kelahiran Bukittinggi 27 tahun silam, masyarakat Minang masih memiliki anggapan bahwa perempuan tidak boleh memiliki kesempatan untuk setara dengan sang suami. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh khalayak lain yaitu DL, wanita berdarah Minang dan Tionghoa ini menyampaikan bahwa kesenjangan yang dialami perempuan berupa stereotipe peran di ranah domestik dan pendidikan. Ia melihat bahwa perempuan di Minangkabau masih banyak yang dilarang untuk menempuh pendidikan tinggi karena hanya akan berakhir ke dapur.

Betapa kompleksnya posisi perempuan di Sumatra Barat menjadikannya berada pada kondisi dualism. Menurut FP, laki-laki berusia 22 tahun ini menyampaikan bahwa perempuan memiliki hak kebebasan bersuara dan memiliki kuasa atas kaumnya lewat peran Bundo Kandung namun dibalik itu, pekerjaan domestik masih dilekatkan oleh anggota keluarga perempuan. Minangkabau dan

belahan dunia lainpun belum benar-benar bisa memberi ruang yang setara untuk perempuan. Bagi SW, perempuan yang besar di Kota Padang ini menyampaikan bahwa kondisi perempuan yang memiliki hak atas warisan pun masih dibawah relasi kuasa laki-laki. Bahkan saat hendak mengurus tanah pusaka, perempuan masih tetap dibawah belenggu laki-laki.

Laporan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 melaporkan Sumatera Barat menempati posisi ketiga terendah dari 34 provinsi dalam pemberdayaan gender yang dilihat dari peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS.go.id, 2021). Di Korea Selatan, secara substansial, angka partisipasi angkatan kerja perempuan (LFPR) Republik Korea Selatan tertinggal dari laki-laki dengan tingkat partisipasi sekitar 77%. Dalam bangku kepemimpinan, jumlah wanita yang memegang jabatan manajerial di perusahaan adalah 19,8% pada tahun 2019, turun dari 20,6% pada tahun 2018. Penjelasan mengenai posisi perempuan Korea Selatan dan posisi perempuan Minangkabau pada dasarnya memiliki satu benang merah yaitu perempuan berada pada posisi tidak berdaya dan rentan untuk didiskriminasi.

Perempuan kerap mengalami pemiskinan peran di ruang publik dan kehilangan hak-haknya ketika telah berumah tangga. Ketidakadilan yang dialami perempuan dari hari ke hari di media massa menempatkan perempuan pada posisi tidak berdaya, tidak memiliki independensi dan otonomi dalam memaknai pengalaman subjektifnya. Dengan kata lain, kerentanan perempuan merupakan produk dari struktur budaya, kebijakan dan relasi yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang ditawarkan oleh gerakan feminisme berkontribusi pada perubahan

dalam memaknai perempuan dan menciptakan lingkungan yang adil baginya. Stereotip mengenai perempuan seperti di atas pada akhirnya mendorong dunia film melahirkan film-film feminis.

Lahirnya film-film feminis tidak lantas menyelamatkan perempuan karena nyatanya angka keikutsertaan perempuan di industri film cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir. Tidak hanya penggambaran perempuan dalam film, peran perempuan yang berkontribusi di industri film juga mengalami pengucilan peran dengan jumlah perempuan yang terhitung jauh lebih sedikit dibandingkan laki laki. Hanya 19% perempuan yang memenuhi posisi sutradara, penulis, produser, produser eksekutif, editor, dan sinematografer dalam 250 film terlaris domestik teratas (Lauzen dalam Oren & Andre L. Press, 2019: 228).

Nilai-nilai di dalam film besar dipengaruhi oleh produsen dibalik makna itu sendiri, penulis dan sutradara film *Kim Ji-Young: Born 1982* adalah perempuan. Kim Do-Young berusaha menyampaikan kritiknya melalui karakter perempuan di dalam film ini. Melalui karakter perempuan di dalam film ini, lewat nilai feminisme kekuasaan Naomi Wolf, sutradara ingin menunjukkan kesenjangan di dalam film dan berusaha untuk mencapai kesetaraan itu dengan mengidentifikasi kekuatan melalui karakter-karakter perempuan di dalam film ini. Stuart Hall (2005: 125) meyakini bahwa makna yang ditawarkan media bersifat terbuka atau *polysemic*, artinya khalayak dapat menanggapi makna secara opositif dan media pada dasarnya sebuah institusi yang tidak memiliki kuasa besar dalam mempengaruhi khalayak.

Artinya, pesan yang ingin disampaikan melalui film *Kim Ji-Young: Born 1982* dapat sepenuhnya dimaknai atau bahkan sepenuhnya ditolak oleh khalayak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melihat analisis resepsi pemaknaan masyarakat Sumatra Barat terhadap feminisme kekuasaan dalam film *Kim Ji-Young: Born 1982* dengan menggunakan teori *encoding – decoding* milik Stuart Hall. Dalam diskursus media massa, hubungan antara media massa dan khalayak selalu dipahami secara linier yang artinya film mempengaruhi khalayak tanpa ada pengaruh khalayak terhadap media massa (Hall, 2005: 125). Melalui analisis resepsi dengan teori *Encoding-Decoding* ini, Stuart Hall memaknai bahwa proses penyampaian pesan melalui media massa sejatinya tidaklah linier, khalayak dianggap aktif memaknai isi pesan dan pemaknaan teks media berbeda sesuai dengan pengalaman dan latar belakang budayanya.

Penelitian ini nantinya tidak hanya melihat bagaimana posisi pemaknaan khalayak tetapi juga melihat faktor kontekstual apa saja yang mampu mempengaruhi perbedaan interpretasi khalayak terhadap feminisme kekuasaan film *Kim Ji-Young: Born 1982*. Bagi penulis, penelitian ini penting untuk dilakukan bukan bertujuan untuk merubah dunia tetapi setidaknya mampu menciptakan gelombang kesadaran bagi khalayak yang nyata memiliki kuasa atas makna yang ditawarkan oleh media, selain itu bagi pembuat film untuk menyadari bahwa fungsi film sebagai media informasi dan edukasi hendaknya menjadikan film sebagai wadah untuk menyuarakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi lingkungan sosial dan budaya.